

MENDUKUNG PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI di Indonesia

ARTIKEL LAINNYA

PENILAIAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI di Taman Nasional Lore Lindu tahun 2023

PEMDA TAMBRAUW FINALKAN DOKUMEN MASTER PLAN Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrau

FORCLIME BERSINERGI DENGAN SEKWIL III BPSKL Dukung Program Perhutanan Sosial di Papua

KPHP SORONG SELATAN TELAH SELESAIKAN ANALISIS SPASIAL TATA HUTAN untuk Penyusunan RPHJP

Editorial

Dalam edisi Newsletter FORCLIME kali ini menampilkan pengalaman FORCLIME dalam memfasilitasi pelaksanaan pelatihan dan pendampingan penilaian pengelolaan kawasan konservasi dengan metoda *Management Effectiveness Tracking Tool (METT)*. Kawasan konservasi memiliki nilai penting bagi konservasi keanekaragaman hayati dan memiliki nilai-nilai yang bersifat universal. Perhatian utama pengelolaan kawasan konservasi saat ini masih pada taman nasional, dengan tidak meninggalkan kawasan konservasi lainnya, yang dikelola oleh unit pelaksana teknis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Taman nasional merupakan kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.



Sejak tahun 2016, FORCLIME mendukung Ditjen KSDAE melakukan penilaian lebih dari 30 kawasan konservasi, baik taman nasional maupun cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru. Dukungan diberikan dalam bentuk bantuan teknis atau keahlian (*expertise*).

Kesepakatan melakukan pelaporan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi telah disepakati oleh 188 negara pada CBD ke 7 tahun 2004. Dan tahun 2007, WWF dan Bank Dunia mengembangkan METT yang kemudian digunakan di hampir 4000 kawasan konservasi di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, FORCLIME mendukung Ditjen KSDAE dalam peningkatan kapasitas pengelola kawasan konservasi dan mitra melakukan penilaian pengelolaan kawasan menggunakan metoda METT sejak tahun 2016.

Melalui Newsletter ini kami juga menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas meninggalnya Dr. Margaretha Pangau-Adam, salah satu konsultan FORCLIME, yang telah wafat pada tanggal 25 Juli lalu.

Ismet Khaeruddin
Senior Advisor bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati & Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Mendukung Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia

Catatan dari fasilitasi pelatihan dan pendampingan penilaian pengelolaan kawasan konservasi menggunakan metoda Management Effectiveness Tracking Tool (METT)

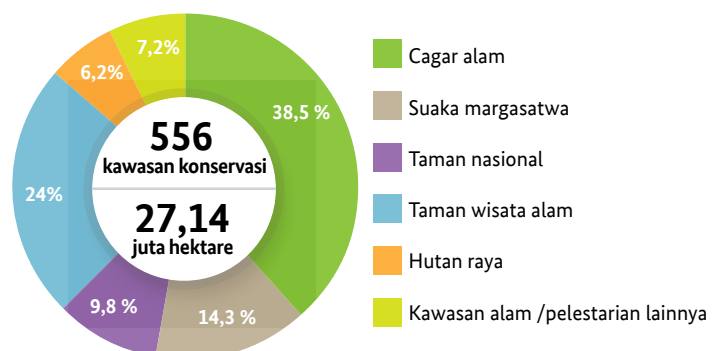
Dr. Ismet Khaeruddin, Senior Adviser bidang Konservasi Keanekaragaman Hayati

2



Area perkemahan di Danau Kalimpaa, Taman Nasional Lore Lindu – Ratu Wina Widyawati.

Menurut peraturan perundangan, kawasan konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Indonesia memiliki 556 kawasan konservasi dengan luas wilayah secara keseluruhan sekitar 27,14 juta hektare. Dari 556 kawasan konservasi tersebut, 214 termasuk ke dalam kategori cagar alam, 80 unit termasuk kategori suaka margasatwa, dan 54 unit merupakan kategori taman nasional (TN). Sedangkan 134 merupakan taman wisata alam (TWA), 34 masuk dalam kategori taman hutan raya (Tahura), dan 29 termasuk kategori kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam lainnya. (wawancara Kompas dengan Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).



Keberadaan kawasan konservasi memberi manfaat positif bagi ekosistem, antara lain melindungi kekayaan alam hayati dan memelihara proses ekologi dan keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Manfaat lain kawasan konservasi adalah melindungi flora dan fauna yang dilindungi termasuk yang endemik, langka dan hampir punah. Adanya kawasan konservasi juga melindungi ekosistem yang memiliki keunikan dan keindahan.

Kawasan konservasi di Indonesia dikelola berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA) dan Pengelolaan Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Dalam UU No. 5 Tahun 1990, yang dimaksud dengan Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah cagar alam, suaka margasatwa.

Sedangkan Kawasan Pelestarian Alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Yang termasuk dalam KPA adalah taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam.

Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi merupakan salah satu target kinerja pengelolaan kawasan konservasi pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) Tahun 2020 – 2024 pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Ditjen KSDAE telah menetapkan nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi untuk memonitor capaian efektivitas pengelolaan suatu kawasan konservasi.

Untuk melakukan penilaian terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi, Direktur Jenderal KSDAE menugaskan Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE dan Kepala Unit Pengelola Tahura untuk:

- Melakukan upaya peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan sesuai dengan rencana tindak lanjut hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan;
- Melanjutkan penilaian efektivitas pengelolaan secara berkala sesuai dengan ketentuan.

Direktorat Jenderal KSDAE menggunakan metoda *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), yang merupakan metoda pendekatan yang diterima secara internasional, untuk memantau dan menilai keseluruhan pengelolaan kawasan konservasi.

METT dapat membantu pihak pengelola kawasan konservasi untuk menilai seberapa efektif kawasan konservasi dikelola, dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi yang ada. Sebagai alat manajemen, METT terdiri dari enam unsur, yaitu: konteks, perencanaan, masukan, proses, hasil dan dampak. Analisis ancaman juga merupakan bagian dari alat ini, yang dilakukan sebagai langkah kedua setelah penilaian informasi umum kawasan lindung.

KSDAE telah mengembangkan panduan untuk melakukan penilaian pengelolaan kawasan konservasi. Selain itu, pada tahun 2016, melalui pendekatan *Training of Trainers*, KSDAE telah melatih 30 orang untuk menjadi kumpulan fasilitator nasional dari lingkup Ditjen KSDAE dan organisasi non-pemerintah yang menjadi mitra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk melakukan penilaian terhadap pengelolaan kawasan konservasi, serta mendukung Ditjen KSDAE melakukan pelatihan fasilitator METT bagi tenaga-tenaga teknis UPT KLHK sehingga mampu melakukan penilaian pengelolaan kawasan secara mandiri.

METT dapat membantu pihak pengelola kawasan konservasi untuk menilai seberapa efektif kawasan konservasi dikelola, dan apa yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kondisi yang ada.



DUKUNGAN FORCLIME BAGI KLHK DALAM PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI.

2017

Untuk mendukung Direktorat Jenderal KSDAE dalam menggunakan METT sebagai Indikator Kinerja Utama, FORCLIME terlibat dalam dukungan berikut:

- 2015 • FORCLIME dan mitra Indonesia mendukung beberapa kegiatan dari Ditjen KSDAE dalam rangka menjadikan METT sebagai alat penilaian efektifitas pengelolaan kawasan konservasi Indonesia, yang berujung diterbitkannya Buku Pedoman Penilaian efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia – *Management Effectiveness Tracking Tool*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, 2015.
- 2016 • Melalui kerja sama dengan mitra non-pemerintah, termasuk FORCLIME, WCS-IP dan USAID-LESTARI; Direktorat Konservasi Kawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memfasilitasi *Training of Trainers* fasilitator nasional penilaian METT 10 – 16 April 2016 di Banyuwangi. Nara sumber dan pelatih pada pelatihan ini adalah Prof. Marc Hocking dari University of Queensland, Vice-Chair, IUCN World Commission on Protected Areas, yang juga merupakan salah satu penulis dari “*Evaluating Effectiveness, A framework for assessing management effectiveness of protected areas*” (IUCN, 2006) dan *Management Effectiveness Tracking Tool* (WWF, 2007).
- FORCLIME dan mitra Indonesia memfasilitasi pelatihan METT bagi rimbawan di Sabah, Malaysia. Fasilitator FORCLIME dan Direktorat Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia, Bapak Rudijanta dan Ibu Dewi, yang sudah mendapatkan pelatihan METT memfasilitasi pelatihan kepada 23 mitra rimbawan di Sabah, Malaysia pada tanggal 21-25 September 2016. Peserta pelatihan adalah perwakilan dari Departemen Kehutanan Sabah, Departemen Satwa Liar Sabah, Yayasan Sabah, *Sabah Environmental Trust*, dan WWF Malaysia. Kegiatan ini didanai oleh WWF Malaysia.



- FORCLIME bersama mitra adakan pelatihan penyegaran mengenai METT. Melalui kerja sama dengan mitra non-pemerintah, termasuk FORCLIME, Proyek GEF-Harimau Sumatera, WCS-IP dan USAID-LESTARI; Direktorat Konservasi Kawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan pelatihan penyegaran mengenai *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT) bagi 30 fasilitator terlatih pada 20-23 Maret 2017 di Bogor.

Selama pelatihan, peserta juga terlibat dalam penyelesaian buku panduan tentang METT berdasarkan pengalaman mereka dari proses penilaian di tempat tugas masing-masing. Selain itu, peserta juga memperoleh pengetahuan tentang *Asset-Based Thinking* dari INSPIRIT, konsultan fasilitasi, untuk meningkatkan kapasitas peserta terkait dengan filosofi dan teknik memfasilitasi. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengharapkan bahwa target perbaikan manajemen yang efektif dari 260 kawasan lindung dapat dicapai pada 2019.

- Mendukung Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum (BBTNBK-DS) melakukan penilaian efektifitas pengelolaan Taman Nasional Betung Kerihun dengan metoda METT pada tanggal 12-15 Juni 2017 di Kantor BBTNBKDS, Putussibau.

4



- 2017 • Mendukung Balai KSDA Kalimantan Barat melakukan penilaian efektivitas pengelolaan tiga belas (13) kawasan konservasi menggunakan metoda METT pada 9 – 10 Agustus 2017. Tiga belas kawasan konservasi dimaksud, yaitu: Cagar Alam (CA) Gunung Nyiut, CA Lo Pat Fun Pi, CA Mandor, CA Muara Kendawangan, CA Pasi, Suaka Alam Laut Kepulauan Karimata, Taman Wisata Alam (TWA) Baning, TWA Bukit Kelam, TWA Asuansang, TWA Gunung Dungan, TWA Gunung Melintang, TWA Sungai Liku, dan TWA Tanjung Belimbing.
- Mendukung Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu melakukan penilaian efektivitas pengelolaan menggunakan metoda METT pada 18 – 20 Oktober 2017. Nilai METT Taman Nasional Lore Lindu pada tahun 2017 adalah 73%.

2018



- Mendukung Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu dan Proyek EPASS melakukan penilaian efektivitas pengelolaan TN Lore Lindu menggunakan metoda METT pada 19 – 20 Desember 2018.



- 2019 • Mendukung Balai Besar Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum pada 15 – 16 Mei 2019 melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasannya.
- Mendukung pelaksanaan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu pada 19 - 20 Desember 2019.
- Mendukung Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua mengelola sembilan kawasan konservasi di Provinsi Papua. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di wilayahnya, BBKSDA Papua mengadakan penilaian atas sembilan kawasan konservasi di bawah administrasinya, yaitu: Cagar Alam (CA) Pegunungan Cycloop, Taman Wisata Alam (TWA) Teluk Youtefa, CA Biak Utara, CA Enarotali, CA Yapen Tengah, Suaka Margasatwa (SM) Pegunungan Jayawijaya, SM Pulau Dolok, SM Pulau Komolom dan SM Pulau Savan.

Penilaian dilakukan melalui FGD dengan menggunakan metoda *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT). Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 November sampai 1 Desember 2022 di Jayapura, Provinsi Papua. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, BBKSDA Papua melibatkan pengelola di tingkat seksi wilayah, instansi pemerintah terkait, akademisi dan juga perwakilan masyarakat adat.

Pelaksanaan kegiatan penilaian terhadap sembilan kawasan konservasi ini, dikawal oleh fasilitator utama dari FORCLIME, Dr. Ismet Khaeruddin, dan Prihananto Setiadji S.T., MT., dari Universitas Cendrawasih, serta empat co-fasilitator dari BBKSDA Papua.



- 2021 • Mendukung Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Lore Lindu. Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Lore Lindu melaksanakan penilaian METT pada 2019 dengan nilai 74, dan sebelumnya pada tahun 2017 dengan nilai 73. Oleh karena itu, tahun 2021, BBTN Lore Lindu kembali melakukan penilaian untuk menilai tingkat efektivitas pengelolaan yang dilakukan dalam kurun waktu Januari 2020 hingga November 2021. Kegiatan penilaian METT diselenggarakan pada tanggal 2-3 November 2021 di Kantor BBTN Lore Lindu, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Dalam kegiatan ini, FORCLIME yang diwakili oleh Dr. Ismet Khaeruddin, bersama dengan Bapak Andhika Chandra, S.Hut, M.Sc selaku perwakilan dari Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menjadi fasilitator penilaian METT. Nilai METT Taman Nasional Lore Lindu tahun 2021 adalah 80.

2021 • **Mendukung penilaian efektivitas pengelolaan kawasan Taman Nasional Wasur.** Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan pengelolaan kawasan, Taman Nasional Wasur melakukan penilaian yang dilakukan secara bersama-sama para pihak agar hasilnya obyektif. Penilaian pengelolaan, menggunakan metoda *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT), dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 Desember 2021 di Merauke, Papua. Kegiatan yang didukung FORCLIME ini, dibuka oleh Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Yarman, S.Hut., MP., dan dihadiri oleh mitra pembangunan di Provinsi Papua, termasuk akademisi, LSM, masyarakat lokal. Sedangkan sebagai fasilitator pelaksanaan METT adalah Dr. Peggy Awanti Nila Krisna, S.Hut., M.E., dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selain itu, juga Senior Advisor FORCLIME, Dr. Ismet Khaeruddin.



2022 • **FORCLIME bersama WCA-IP mendukung Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi memberikan Bimbingan Teknis** kepada 100 Fasilitator Penilaian METT dari UPT KLHK seluruh Indonesia pada 5 – 8 September 2022. Dari fasilitasi Bimbingan Teknis ini UPT KLHK sebanyak 80 fasilitator sudah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan menggunakan metoda METT secara mandiri atau melalui bimbingan/pantauan fasilitator nasional.

Sejak pendampingan tahun 2016 hingga tahun 2023, sudah 554 kawasan konservasi yang telah dinilai efektivitas pengelolannya menggunakan metoda METT. Wilayah tersebut merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh 74 Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, meliputi 48 UPT sebagai pengelola kawasan taman nasional dan 26 UPT Konservasi Sumber Daya Alam yang mengelola kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam dan taman buru, serta 34 UPT Daerah sebagai pengelola Tahura. Dari kawasan konservasi tersebut, sebanyak 30 kawasan tersebar di Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat, pernah difasilitasi FORCLIME untuk penilaian efektivitas pengelolaan kawasannya menggunakan metoda METT, dengan kisaran hasil penilaian dari 35 sampai 80. Saat ini KDSAE sudah memiliki sekitar 100 Fasilitator METT yang siap pakai karena telah mengikuti pelatihan Bimbingan Teknis Penilaian METT dan pendampingan.

2022 • **Mendukung BBKSDA Sulawesi Selatan melakukan penilaian efektivitas pengelolaan tujuh kawasan konservasi menggunakan METT** pada 29 – 30 Oktober 2022. Tujuh kawasan konservasi dimaksud, yaitu: CA Faruhumpenai, CA Kalaena, CA Ponda Ponda, TWA Danau Matano dan TWA Danau Towoti di Bidang Konservasi Wilayah I. Dan TWA Cani Sirenreng di Bidang Konservasi Wilayah II. Oleh karena jadwal pendampingan berhimpitan dengan jadwal lain, maka pendampingan hanya dilakukan separuh waktu secara daring.



Artikel lainnya

Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Taman Nasional Lore Lindu tahun 2023



Untuk mengetahui keefektifan pengelolaan kawasannya, Balai Besar Taman Nasional (BBTN) Lore Lindu melakukan penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi menggunakan metoda *Management Effectiveness Tracking Tool* (METT). Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penilaian ini dilakukan setiap

dua tahun sekali. BBTN Lore Lindu terakhir melaksanakan penilaian METT pada tahun 2021, dan pada tanggal 23-24 Mei 2023 kembali melaksanakan penilaian untuk tahun periode Januari 2022 hingga Mei 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dan dipimpin oleh Ibu Dr. Ir. Titik Wurdiningsih, M.Si selaku Kepala BBTN Lore Lindu.

Dalam kegiatan ini, FORCLIME yang diwakili oleh Dr. Ismet Khaeruddin, menjadi salah satu fasilitator penilaian METT. Kegiatan ini dihadiri oleh para staf BBTN Lore Lindu yang memberikan masukan, refleksi, dan evaluasi terhadap pengelolaan kawasan. Penilaian menggunakan metoda METT ini menggunakan beberapa lembar data yang harus dilengkapi, yang meliputi pelaporan kemajuan situs kawasan konservasi, ancaman terhadap kawasan konservasi, serta penilaian efektivitas pengelolaan itu sendiri, yang membahas status hukum kawasan konservasi hingga nilai-nilai penting kawasan. Adapun beberapa rekomendasi yang dihasilkan dari pertemuan tersebut adalah pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pelaksanaan pemantauan satwa prioritas, serta patroli rutin di wilayah dengan kategori gangguan tinggi.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Arif Hidayat**, Advisor Junior bidang Kehutanan dan Keanekaragaman Hayati
2. **Ismet Khaeruddin**, Advisor Senior, Focal Point Keanekaragaman Hayati KFW Forest Program 3 dan Koordinator Provinsi Sulawesi Tengah

Pemda Tambrau Finalkan Dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrau



Pemerintah Daerah Kabupaten Tambrau mengumumkan dokumen Master Plan Kabupaten Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrau dalam lokakarya yang diadakan pada tanggal 6 Juni 2023 di Aula Kantor Bappeda Tambrau, Papua Barat Daya. Acara yang dibuka oleh Assisten II Sekretaris Daerah Bidang Pembangunan Ekonomi Kabupaten Tambrau, Bapak Abdul Malik Kastella, SH., dihadiri oleh dinas-dinas dan kepala distrik lingkup Kabupaten Tambrau. Selain itu, juga dihadiri oleh mitra pembangunan Kabupaten Tambrau, antara lain Universitas Papua, FORCLIME, Samdhana Institute, Yayasan Konservasi Indonesia, Flora Fauna International, Econusa, Akawoun, Pioner, Urdu.

Dalam lokakarya tersebut diumumkan Surat Keputusan Bupati Tambrau tentang Panitia Masyarakat Hukum Adat Kabupaten Tambrau. Selain itu, pada acara yang sama, diluncurkan (*launching*) Sekretariat Mitra Pembangunan Tambrau yang berlokasi di perkantoran Bappeda Kabupaten Tambrau. Adanya sekretariat ini diharapkan dapat memudahkan koordinasi dan komunikasi antara mitra pembangunan dan dinas terkait.

Pada kesempatan tersebut para mitra pembangunan mempresentasikan kegiatan dan rencana aksi tahun 2023. FORCLIME menampilkan kegiatan-kegiatan yang telah, sedang dan akan dilakukan, antara lain:

1. Mendukung Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tambrau, yang kegiatannya terbagi menjadi tiga bagian utama yakni:
 - Inventarisasi potensi biogeofisik dan sosial ekonomi di wilayah KPH Tambrau. Kegiatan survei telah dilaksanakan pada bulan Januari – Februari 2023, dan saat ini sedang proses penyusunan laporan final.
 - Analisis spasial tata hutan termasuk didalamnya penataan blok dan petak, yang akan dilaksanakan tahun 2023.
 - Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP), yang akan dilaksanakan tahun 2023.
2. Mendukung penyusunan RPHJP di Cagar Alam Pantai Sausapor (sedang berjalan).
3. Mendukung kelompok tani hutan di Kampung Bikar, Distrik Bikar dan di Kampung Emaus, Distrik Sausapor untuk peningkatan kapasitas dalam kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha terkait dengan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan di masing-masing kampung dukungan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Nita Yohana, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. Mohammad Sidiq, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat

FORCLIME Bersinergi dengan Sekwil III BPSKL Dukung Program Perhutanan Sosial di Papua

Pada tanggal 25 Mei 2023, FORCLIME bersama Seksi Wilayah III Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Sekwil III BPSKL) Maluku-Papua mengadakan pertemuan dalam rangka membangun sinergi pasca dibukanya kantor Sekwil III BPSKL di Kota Jayapura. Pertemuan tersebut dibuka oleh Kepala Sekwil III BPSKL, Bapak Nelson Kainama, S.Hut., M.Si., dan dihadiri oleh tim teknis FORCLIME yang berkantor di Jayapura. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mendukung Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DKLH Papua) terkait pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial (PPS) Provinsi Papua periode 2023 – 2025 serta rencana penyusunan *roadmap* PPS Provinsi Papua yang mana sejalan dengan Peraturan Presiden RI No 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana kerja sama untuk mendukung penyusunan 27 dokumen Rencana Kerja Perhutanan Sosial untuk Kota Jayapura (1 Kelompok Usaha Perhutanan Sosila-KUPS), Kabupaten Jayapura (16 KUPS), dan Kabupaten Sarmi (6 KUPS). Dari kerja sama ini diharapkan kampung-kampung dukungan FORCLIME bersama Balai Besar



Konservasi Sumber Daya Alam Papua, Taman Nasional Wasur dan DKLH Papua menjadi model untuk Perhutanan Sosial lintas direktorat di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. Rut M Ohoiwuton, Advisor Junior bidang hutan kemasyarakatan dan hutan adat, Papua
2. Mohammad Sidiq, Manajer bidang strategis, pengelolaan hutan lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

KPHP Sorong Selatan telah Selesaikan Analisis Spasial Tata Hutan untuk Penyusunan RPHJP

Sejak tahun 2022, FORCLIME mendukung Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Sorong Selatan dalam menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP). Kegiatan ini dimulai dengan pembinaan teknis penyusunan RPHJP untuk KPH di Provinsi Papua Barat, yang juga diikuti oleh perwakilan KPHP Sorong Selatan. Sesuai pelaksanaan pembinaan teknis, KPHP Sorong Selatan membentuk Tim Penyusun Tata Hutan, dan FORCLIME termasuk ke dalam tim tersebut bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XVII Manokwari.

Pertemuan koordinasi pertama tim dilaksanakan pada tanggal 6-10 Maret 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat, Manokwari. Dalam pertemuan tersebut, tim bertemu dengan perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan data-data yang akan diperlukan dalam analisis, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat, Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Papua Barat, data terkait DAS, kebakaran hutan, perhutanan sosial, dan data pendukung lainnya. Dalam koordinasi ini, FORCLIME juga memberikan bimbingan teknis terkait tahapan pembagian batas blok dan petak.

Pertemuan berikutnya dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2023 secara daring. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan peninjauan terhadap analisis spasial tata hutan di KPHP Sorong Selatan dan konfirmasi data-data yang terkait. Selanjutnya, tim kembali bertemu di Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat pada tanggal 24-28 Maret 2023 di Manokwari untuk melakukan validasi hasil analisis blok dan persiapan pembuatan peta-peta tematik dalam RPHJP.



Setelah seluruh proses selesai dilakukan, dilaksanakan FGD untuk menyampaikan hasil akhir analisis spasial tata hutan. FGD ini dilaksanakan secara daring pada tanggal 14 Juni 2023, dipimpin oleh Bapak Reynold Kesaulija S.Hut., M.Si., selaku Kepala KPHP Sorong Selatan. FGD ini dihadiri juga oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait di region Papua Barat. Berdasarkan hasil FGD, tim penyusun akan menyampaikan hasil analisis secara tertulis kepada BPKHTL Wilayah XVII Manokwari untuk melakukan verifikasi akhir sebelum dilakukan penginputan kedalam Sistem Informasi (SI) RPHJP milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:

1. **Nita Yohana**, Advisor Bidang Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua Barat
2. **Mohammad Sidiq**, Manajer Bidang Strategis, Pengelolaan Hutan Lestari dan Koordinator Provinsi Papua dan Papua Barat



Selamat Jalan Sahabat

Selamat jalan ibu **Margaretha Pangau-Adam**

Beliau meninggal dalam kecelakaan di pantai Mahembang, Sulawesi Utara pada hari Selasa 25 juli 2023.



Beliau sudah berkontribusi dalam implementasi GIZ FORCLIME dan cukup dikenal oleh beberapa personal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Beberapa kali beliau mendampingi delegasi Indonesia sebagai penerjemah dalam kunjungan ke Jerman. Dan kegiatan terakhir beliau sebagai dosen Universitas Cenderawasih adalah menjadi konsultan dalam studi populasi rusa daerah Tambrauw untuk memberikan masukan terhadap kuota pemanfaatan rusa di Tambrauw dan Provinsi Papua Barat /Provinsi Papua Barat Daya.

Kami GIZ FORCLIME dan mitra merasa kehilangan dan ingin menyampaikan duka yang sangat dalam serta terima kasih atas kontribusinya selama ini.

Selamat jalan sahabat.....



FORCLIME Forests and Climate Change Programme
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Mangala Wanabakti Building, Block VII, 6th Floor
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270, Indonesia
Tel: +62 (0)21 572 0212, +62 (0)21 572 0214
Fax: +62 (0)21 572 0193
www.forclime.org

FORCLIME Kerja Sama Teknis (TC) adalah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan GIZ, dan didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ).

Surel korespondensi: ratu.widyawati@giz.de



Bekerja sama dengan:

